



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 05/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/04/2022

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 20 April 2022

KY Terima 385 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran KEPPH di Triwulan Pertama Tahun 2022

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menerima 385 laporan masyarakat dan 179 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada triwulan pertama tahun 2022. Dibandingkan triwulan pertama tahun 2021, jumlah laporan masyarakat relatif sama di mana tahun lalu berjumlah 378 laporan.

"Sejak pandemi Covid-19 tren laporan masyarakat mulai banyak yang menyampaikan secara online, yaitu 70 laporan. Meski dominasi melalui jasa pengiriman surat sebanyak 191 laporan dan datang secara langsung 119 laporan, dan 5 laporan sisanya berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim," buka Ketua Bidang Pengawasan Hakim KY Joko Sasmito dalam konferensi pers daring Bidang Pengawasan Hakim Triwulan Pertama Tahun 2022, Rabu (20/04).

Menurut Joko, antusiasme publik ini membuktikan peran aktif publik dalam menjaga integritas hakim, sehingga peradilan bersih dan berwibawa dapat terwujud. Joko Sasmito lebih lanjut merinci laporan masyarakat berdasarkan jenis perkara yang didominasi masalah perdata.

"Dilihat dari jenis perkaranya, masalah perdata masih mendominasi, yaitu 182 laporan. Untuk perkara pidana jumlahnya 93 laporan," jelas Joko.

Sementara itu, lanjut Joko, pengaduan terkait tata usaha negara ada 26 laporan, perkara agama ada 25 laporan, tipikor ada 13 laporan, niaga ada 13 laporan, perselisihan hubungan industrial ada 12 laporan, lingkungan ada 5 laporan, militer ada 4 laporan, dan 12 laporan lainnya.

Joko menguraikan 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Menurutnya, dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan. Paling banyak adalah DKI Jakarta 78 laporan, Jawa Timur 48 laporan, Sumatera Utara 39 laporan, Jawa Tengah 27 laporan, Jawa Barat 26 laporan, Riau 16 laporan, Sumatera Selatan 14 laporan, Sulawesi Selatan dan Banten masing-masing 13 laporan, Jambi 12 laporan, dan Kalimantan Timur 10 laporan.

Adapun dilihat dari jenis peradilan yang dilaporkan, masih didominasi oleh peradilan umum, yakni 241 laporan. Posisi selanjutnya, yakni peradilan agama 39 laporan, Mahkamah Agung 38 laporan, Tata Usaha Negara sejumlah 26 laporan, Niaga 13 laporan, Tipikor 7 laporan, Hubungan Industrial 6 laporan, Militer 5 laporan, dan 10 laporan lainnya.

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

"Dari yang telah diverifikasi sejumlah 359 laporan dengan presentase 93,24% dari laporan yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 68 laporan. Yaitu berasal dari laporan tahun 2021 sebanyak 48, dan tahun 2022 sebanyak 20," lanjut Joko.

Sementara lainnya, ada 123 laporan masih menunggu permohonan kelengkapan, 10 laporan bukan kewenangan KY, 36 laporan diteruskan ke instansi lain, dan laporan tidak dapat diterima ada 56 laporan. Ada juga laporan yang diteruskan ke bagian investigasi 6 laporan, serta masih proses verifikasi 26 laporan. Yang terbanyak kedua adalah permohonan pemantauan, yaitu 108 laporan. Selanjutnya, untuk laporan akan dilakukan analisis secara mendalam sebanyak 74 laporan.

Pemantauan Persidangan KEPPH

Joko juga mengungkapkan bahwa periode periode 3 Januari hingga 31 Maret 2022, KY telah menerima 108 permohonan pemantauan yang berasal dari 84 laporan masyarakat dan 24 pemantauan berdasarkan inisiatif KY.

"Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hasil dari tindak lanjut permohonan pemantauan periode Januari hingga Maret 2022 adalah 54 dapat dilakukan pemantauan, 20 tidak dapat dilakukan pemantauan, dan 34 dalam tahap analisis," jelas Joko.

Ada beberapa sebab permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Ada yang bukan merupakan kewenangan KY, kemudian adapula perkara yang dimohonkan ternyata sudah diputus, dan tidak ada dugaan awal pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY
Miko Ginting
Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,
(021) 3906189
www.komisiyudisial.go.id
email: humas@komisiyudisial.go.id



PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TRI WULAN I (JANUARI-MARET 2022)

JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT DITERIMA KOMISI YUDISIAL





JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT DITERIMA KOMISI YUDISIAL



PENERIMAN LAPORAN MASYARAKAT BERDASARKAN BADAN PERADILAN





10 WILAYAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN

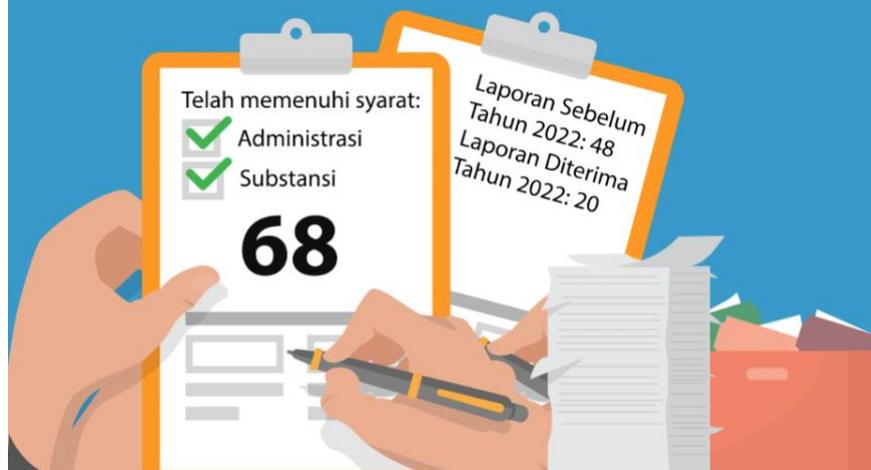
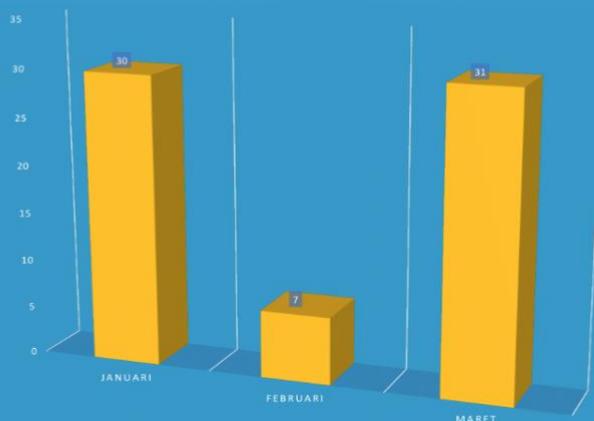


Provinsi lainnya:

11. Kalimantan Timur	: 10 Laporan	23. Maluku	: 4 Laporan
12. Kalimantan Barat	: 8 Laporan	24. Papua	: 3 Laporan
13. Sumatera Barat	: 7 Laporan	25. Nangro Aceh Darussalam	: 2 Laporan
14. Lampung	: 7 Laporan	26. Bengkulu	: 2 Laporan
15. DI Yogyakarta	: 7 Laporan	27. Bangka Belitung	: 2 Laporan
16. Bali	: 7 Laporan	28. Sulawesi Tenggara	: 2 Laporan
17. Nusa Tenggara Timur	: 6 Laporan	29. Maluku Utara	: 2 Laporan
18. Kalimantan Tengah	: 6 Laporan	30. Sulawesi Barat	: 1 Laporan
19. Kalimantan Selatan	: 6 Laporan	31. Sulawesi Tengah	: 1 Laporan
20. Kepulauan Riau	: 5 Laporan	32. Gorontalo	: 1 Laporan
21. Sulawesi Utara	: 5 Laporan	33. Papua Barat	: 1 Laporan
22. Nusa Tenggara Barat	: 4 Laporan	34. Kalimantan Utara	: 0 Laporan



JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISTRASI



Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan yang terdiri dari dua tim:

- a. Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP);
- b. Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPL).

TPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Inti dari tahap ini untuk melihat berwenang atau tidaknya Komisi Yudisial menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.

**VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT**

sampai dengan Maret 2022

359 laporan telah diverifikasi

Bukan kewenangan KY

10

Permohonan kelengkapan

123

Meneruskan ke Instansi lain

36

Permohonan Pemantauan

108

Meneruskan ke Investigasi

6

Meneruskan ke Advokasi

0

Laporan tidak dapat diterima

56

Proses verifikasi

26

Register

20



PEMANTAUAN PERSIDANGAN UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEPPH

Permohonan Pemantauan
Januari - Maret 2022

108



“ Ada beberapa sebab permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Ada yang bukan merupakan kewenangan KY, kemudian adapula perkara yang dimohonkan ternyata sudah diputus, dan tidak ada dugaan awal pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim. ”

